



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 36 TAHUN 2016**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2016-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk mengukur dan meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong serta melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4915);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

- Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
 17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/ 20/ MENPAN/ 11/ 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2014 Nomor 94);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 117).

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Memutuskan

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2016-2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

7. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
8. Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan.
9. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
11. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
12. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
13. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
14. Unit kerja mandiri adalah unit organisasi dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki dan mengelola sendiri sumber daya berupa sumber daya manusia, anggaran serta sarana dan prasarana yang ada di lingkungannya.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan indikator kinerja utama Pemerintah Daerah Tahun 2016-2021 adalah:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 3

- (1) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021.
- (2) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2016-2021 yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1

Pasal 4

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja Mandiri melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.
- (3) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja Mandiri serta disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Dalam hal indikator kinerja utama ini menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja Perangkat Daerah secara keseluruhan, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah agar ditentukan pengembangannya lebih lanjut untuk perbaikan.

Pasal 6

- (1) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan pembinaan dalam pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan kerja masing-masing.
- (2) Selain melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan koordinasi untuk pengintegrasian sistem pengukuran kinerja dengan sistem administrasi pemerintahan yang lainnya baik perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban.

Pasal 7

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 8

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 15 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan Bupati ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

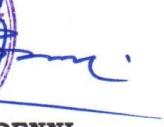
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada Tanggal 15 Desember 2016


BUPATI REJANG LEBONG,

H. AHMAD HIJAZI

Diundangkan di Curup
Pada Tanggal 15 Desember 2016


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

R. A. DENNI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
 NOMOR 36 TAHUN 2016
 TANGGAL 15 Desember 2016

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2016-2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA /SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya jangkauan dan mutu layanan kesehatan yang merata dan adil untuk semua lapisan masyarakat	Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Kegiatan : Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu hamil dari keluarga kurang mampu	
	Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Dinkes
	% Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Dinkes
	% Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (bawah dua tahun)		
	Jumlah Desa yang belum memiliki Bidan Desa	Program Pengembangan SDM Kesehatan	Dinkes , BKD
	Angka Kejadian Malaria (API) per 1.000 penduduk	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Dinkes
	Prevalensi HIV		
	Angka Penemuan Kasus TB (CDR)		
	% Desa yang mencapai UCI (Universal Child Immunisation)		
	Jumlah puskesmas yang akan ditingkatkan statusnya menjadi puskesmas rawat inap	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Dinkes
		Program Pengembangan SDM Kesehatan	Dinkes/ BKD
	Jumlah kecamatan yang belum memiliki puskesmas	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Dinkes
		Program Pengembangan SDM Kesehatan	Dinkes/ BKD

SASARAN	INDIKATOR KINERJA /SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Jumlah Desa/ kelurahan yang belum memiliki Sarana Kesehatan (Pustu/ Poskesdes)	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Dinkes
	Jumlah Desa /Kelurahan yang sarana kesehatannya perlu direvitalisasi	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	Dinas PU
		Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdaagangan/ PLN
	Jumlah masyarakat yang membutuhkan jaminan pelayanan kesehatan	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
	Persentase Tahapan akreditasi RSUD Curup dari C ke B	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	RSUD
	Jumlah dokter spesialis	Program Pengembangan SDM Kesehatan	
Meningkatnya jangkauan dan mutu layanan pendidikan yang merata dan adil untuk semua lapisan masyarakat			
	Angka partisipasi murni (APM) (%) PAUD	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Diknas
		Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	Dinas PU
		Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdaagangan/ PLN
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Diknas
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	BKD
	Angka partisipasi murni (APM) (%) SD	Program wajar dikdas/Bantuan Keuangan kepada kab/kota	Diknas
		Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	Dinas PU

SASARAN	INDIKATOR KINERJA /SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdaagangan/ PLN
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Diknas
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	BKD
	Angka partisipasi murni (APM) (%) SLTP	Program wajar dikdas/Bantuan Keuangan kepada kab/kota	Diknas
		Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	Dinas PU
		Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Dinas ESDM/PLN
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Diknas
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	BKD
		Program Pendidikan Menengah	Diknas
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA	Program wajar dikdas/Bantuan Keuangan kepada kab/kota	Diknas
	Jumlah Desa yang belum memiliki SD	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	Dinas PU
		Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdaagangan/ PLN
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Diknas
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	BKD

SASARAN	INDIKATOR KINERJA /SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Jumlah Kecamatan yang belum memiliki minimal 2 SLTP	Program wajar dikdas/Bantuan Keuangan kepada kab/kota	Diknas
		Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	Dinas PU
		Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdaagangan/ PLN
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Diknas
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	BKD
	Angka buta aksara (%)	Program pendidikan non formal	Diknas
	Persentase Guru SD yang berpendidikan Minimal S1 (%)	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Diknas
	Persentase Guru SD bersertifikasi (%)	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Diknas
	Persentase Guru SLTP yang berpendidikan Minimal S1 (%)	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Diknas
	Persentase Guru SLTP bersertifikasi (%)	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Diknas
	Persentase Guru SMA/SMK/MA bersertifikasi (%)	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Diknas
	Persentase SD yang ter-akreditasi	Program wajar dikdas/Bantuan Keuangan kepada kab/kota	Diknas
	Persentase SLTP yang ter-akreditasi	Program wajar dikdas/Bantuan Keuangan kepada kab/kota	Diknas
	Persentase SMA/ SMK/MA yang ter-akreditasi	Program Pendidikan Menengah/Bantuan Keuangan kepada kab/kota	Diknas
	Jumlah pengunjung perpustakaan (orang).	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	

SASARAN	INDIKATOR KINERJA /SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis keunggulan lokal			
	Jumlah sentra industri yang dikembangkan dalam kecamatan (sentra)	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdaagangan
	Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB)	Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdaagangan
	Jumlah Wira Usaha Baru (WUB) yang dibangun	Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdaagangan
Meningkatnya Kapasitas UMKM dan Koperasi serta berkembangnya sarana perdagangan rakyat			
	Jumlah KUKM yang akan mendapatkan bimbingan dan pelatihan teknis	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM, Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdaagangan
	Jumlah KUKM yang akan mendapat bantuan peralatan	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdaagangan
	Jumlah Kelompok IKM yang akan mendapat bantuan peralatan	Program Penataan Struktur industri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdaagangan
	Jumlah Koperasi yang di revitalisasi (koperasi tidak aktif)	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdaagangan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA /SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Jumlah pasar tradisional yang akan di revitalisasi	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Kemen Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan
Meningkatnya pemenuhan akses masyarakat terhadap infrastruktur pertanian dan perkebunan			
	Panjang jalan usaha tani yang dibangun (m)	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Dinas Pertanian
		Program Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian, Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Kementan
	Panjang jalan usaha Tani yang direhabilitasi (M)	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Distan
	Panjang jalan sentra produksi yang di bangun (m)	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Disnas kehutanan dan perkebunan
		Program Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian	Kementan
	Panjang Jalan sentra Produksi yang kualitasnya meningkat (m)	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Disnas kehutanan dan perkebunan
	Luas Jaringan irigasi usaha tani yang dibangun (Ha)	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Dinas Pertanian
	Prosentase jaringan irigasi wewenang kabupaten dalam kondisi baik (%)	Program : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	DINAS PU
Meningkatnya investasi			

SASARAN	INDIKATOR KINERJA /SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Jumlah Perusahaan yang berinvestasi di Rejang Lebong	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Setda (Bagian Administrasi Ekonomi dan Penanaman Modal)
		Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Setda (Bagian Administrasi Ekonomi dan Penanaman Modal)
	Jumlah jenis promosi yang dilakukan	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama investasi	Setda (Bagian Administrasi Ekonomi dan Penanaman Modal)
	Jumlah jenis perizinan/nonperizinan yang dilayani	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Kantor Pelayanan Terpadu
		Program Penataan Peraturan Per-Undang-Undangan	Kantor Pelayanan Terpadu
	Rata-rata lama penerbitan surat perizinan investasi (hari)	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Kantor Pelayanan Terpadu
	Rata-rata lama penerbitan surat perizinan dan non perizinan (hari)		
Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam bagi pembangunan			
	Cetak sawah baru (ha)	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Distan, Kementan
	Produksi Tanaman Pangan dan hortikultura (ton) :	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Distan, Kementan
	a. padi		
	b. Jagung		
	c. Kedelai		
	d. Ubi Kayu		
	e. Ubi Jalar		

SASARAN	INDIKATOR KINERJA /SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	f. Kacang Tanah		
	g. Kacang Hijau		
	h. Sayuran		
	- Cabe Merah		
	- Bawang Merah		
	- Kentang		
	- Wortel		
	- Kubis		
	- Labu Siam		
	- Sawi		
	- Tomat		
	- Cabe Rawit		
	e. Buah-buahan		
	- Jambu Biji Merah		
	- Manggis		
	- Jeruk		
	- Alpukat		
	Jumlah Desa/Kelurahan Mandiri Benih yang dibangun	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Distan, Kementan, Dinas Kehutanan
	Jumlah Benih Tanaman Pangan (IIa)	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	
	- Padi		
	- Jagung		
	- Kedelai		
	- Kacang Tanah		
	- Kacang Hijau		
	- Ubi Kayu		
	- Ubi Jalar		
	Jumlah Benih Hortikultura		
	- Cabe Merah		
	- Kentang		
	- Wortel		
	Produksi Perkebunan unggulan		
	Karet		
	Kopi		
	Lada		
	Pala		
	Kakao		
	Aren		
	Kelapa Sawit		
	Jumlah jenis komoditas industri hilir berbasis pertanian dan perkebunan yang dikembangkan	Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian dan perkebunan, Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Distan, Kementan
	Standar Mutu dan Jumlah Diversifikasi Produk Pertanian/Perkebunan, Jumlah benih/bibit unggul tanaman	Program peningkatan ketahanan pangan (Pertanian/Perkebunan)	Distan, Kementan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA /SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	perkebunan, peningkatan optimasi pengelolaan lahan dengan meningkatkan produksi perkebunan unggulan dan peningkatan sarana/prasarana pertanian/perkebunan		
	Kemampuan Administrasi Umum dan keuangan Petani dan pelaku Agribisnis	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	Jumlah sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan jumlah bimbingan teknologi perkebunan teknologi	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan, Program Pengembangan Agribisnis	Distan, Kementan
	Jumlah Desa/kawasan mandiri pangan yang dibina/dikembangkan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	
	Jumlah penumbuhan desa mandiri pangan	Program Pengembangan Agribisnis	
	Jumlah gapoktan untuk pengembangan Packaging beras		
	Luas hutan kemasyarakatan yang dikelola		
	Jumlah jenis industri hasil hutan yang dikembangkan		
	Produksi daging ternak (ton)	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Dinas Peternakan dan Perikanan, Kementan
	a. Sapi		
	b. Kambing/Domba		
	c. Unggas		
		Program pemenuhan Pangan Asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat	Kementan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA /SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Susu (liter)	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Dinas Peternakan dan Perikanan, Kementan
	Produksi telur (ton)	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Dinas Peternakan dan Perikanan, Kementan
	Jumlah Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Kelompok	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Dinas Peternakan dan Perikanan, Kementan
	Jumlah unit pengolahan hasil ternak yang direvitalisasi (Unit)	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	Dinas Peternakan dan Perikanan, Kementan
		Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Dinas Peternakan dan Perikanan, Kementan
	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Program Budidaya Perikanan	Dinas Peternakan dan Perikanan, Kemen KKP
	Prosentasi Tingkat hunian hotel	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Rata-rata lama tinggal (hari)	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Jumlah Wisatawan Mancanegara (Orang)	Program Pemasaran Pariwisata 1. Pengembangan Event Pariwisata Daerah) Program Pengembangan Nilai Budaya (Pagelaran Seni Budaya dalam dan luar daerah)	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Jumlah Wisatawan Nusantara (per tahun)	Program Pemasaran Pariwisata 1. Pengembangan Event Pariwisata)	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Nilai Budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA /SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Jumlah lokasi wisata yang akan dikembangkan menjadi destinasi pariwisata nasional (DPN)	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Meningkatnya kesempatan kerja yang adil dan transparan, terutama bagi penurunan angka pengangguran di kalangan terdidik melalui pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pasar kerja.			
	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Jumlah masyarakat kurang mampu yang mengikuti pelatihan kewirausahaan, keterampilan dan keahlian dalam memulai usaha	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Terwujudnya kehidupan bergama yang harmonis			
	Jumlah tempat ibadah yang direvitaliasi	Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan	Dinas PU/Desa
	Persentase tahapan pembangunan BLK	Peningkatan Sarana dan Prasarana	
	Jumlah penyuluhan agama	Program Peningkatan Kualitas Kehidupan beragama	Kemenag/Bag.Kesra
	Jumlah penyuluhan kerukunan beragama di kecamatan		
		Program mengembangkan seni budaya daerah	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui reformasi birokrasi	Jumlah kasus dan temuan	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH	Inspektorat, DPKAD, Bagian Umum dan Keuangan
	Persentase kasus dan temuan yang terselesaikan		
	Opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah		
	Nilai Evaluasi SAKIP	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Setda

SASARAN	INDIKATOR KINERJA /SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH	Inspektorat
	Persentase SKPD yang memperoleh nilai SAKIP minimal CC	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Setda
	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH	
	Persentase Jumlah Program dalam RKPD yang selaras dengan sasaran RPJMD	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
	Jumlah aplikasi elektronik yang dikembangkan	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH	Inspektotat
	Tingkat/level maturitas sistem pengendalian internal pemerintah		
	Tingkat kapasitas aparat pengawasan internal pemerintah		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di perizinan pelayanan terpadu	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Setda
	Jumlah unit pelayanan publik yang patuh pada norma dan prosedur		
	1. Merah	Program Peningkatan Pelayanan Publik	
	2. Kuning		
	3. Hijau		

SASARAN	INDIKATOR KINERJA /SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Jumlah kecamatan yang telah menerapkan sistem informasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)		
Meningkatnya kinerja pemerintahan melalui profesionalisme dan tata kelola pemerintahan yang baik			
	Persentase penempatan ASN pemerintah Kabupaten berdasarkan kualifikasi pendidikan (%)	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
	Persentase SKPD Kabupaten yang memiliki jumlah ASN sesuai dengan kebutuhan (%)	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
	Persentase pejabat struktural Kabupaten Rejang Lebong yang telah mengikuti diklat kepemimpinan	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
	- Eselon II		
	- Eselon III		
	- Eselon IV		
	Persentase ASN Kabupaten Rejang Lebong yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional		Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Meningkatkan Kinerja bidang Kependudukan	Jumlah ASN yang mengikuti :	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	
	- Spesialis kedokteran		
	- S1		
	- S2		

SASARAN	INDIKATOR KINERJA / SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Persentase penduduk yang telah memiliki KTP	Program Penataan Administrasi Kependudukan	
	Persentase keluarga yang telah memiliki kartu keluarga		
	Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran		
Meningkatnya penerapan yang konsistensi antar dokumen perencanaan			
	Persentase kesesuaian jumlah program antara:		
	RPJMD dengan RKPD	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
	RKPD dengan APBD	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
Meningkatnya pemenuhan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar			
	Jumlah desa yang belum teraliri listrik	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	Energi dan Sumber Daya Mineral
	Prosentase jalan kabupaten dalam kondisi baik/ sedang (%)	1. Program Rehabilitasi Jalan dan Jembatan, 2. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, 3. Program Pengembangan Infrastruktur Pedesaan	Dinas PU
	Prosentase rumah tangga berakses air bersih (%)	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	PU/Dinkes

SASARAN	INDIKATOR KINERJA /SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Persentase rumah tangga bersanitasi (%)	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	PU/Dinkes
	Persentase lingkungan permukiman kumuh (%)	1. Program Pengembanganan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh; 2. Program Pengembangan Perumahan;	PU/Dinkes
	Rasio Elektrifikasi	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	Dinas Pertambangan dan Enerrgi
Meningkatnya pelayanan transportasi perhubungan darat			
	Jumlah perlengkapan Fasilitas Keselamatan jalan yang terpasang	Program Rehabilitasi dan Pemerliharan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Dishub, Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
Mengurangi resiko kerusakan lingkungan			
	Indeks pengendalian pencemaran Air (%)		
	Indeks pengendalian pencemaran Udara		
	Persentase pengelolaan sampah	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
	Jumlah TPS	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	
	Persentase luas tutupan lahan meningkat atau luas lahan kritis yang direhabilitasi (dalam kawasan dan diluar kawasan)	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan KemenLHK
Meningkatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana			

SASARAN	INDIKATOR KINERJA /SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Prosentase desa tangguh bencana di daerah zona merah (berisiko tinggi)	1) Program pengurangan risiko bencana; 2) Program peningkatan kualitas SDM dan kesiapsiagaan tanggap darurat; 3) Program sarana dan prasarana logistik dan peralatan penanggulangan bencana; 4) Program pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana; 5) Program rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana fisik di wilayah pasca bencana; 6) Program rehabilitasi dan rekonstruksi bidang sosial ekonomi di wilayah pasca bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran & Pemadam Kebakaran
	Prosentase sekolah aman bencana (%)	1) Program pengurangan risiko bencana; 2) Program peningkatan kualitas SDM dan kesiapsiagaan tanggap darurat;	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran & Pemadam Kebakaran
Meningkatnya perlindungan dan pelayanan sosial bagi masyarakat serta perentasan desa tertinggal			
	Jumlah Kepala keluarga miskin yang diberdayakan (KK)	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Jumlah penyandang masalah Kesejahteraan sosial yang dibina, direhab dan dilayani (Orang)	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	

SASARAN	INDIKATOR KINERJA /SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Jumlah partisipasi masyarakat dalam potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) (Orang/lembaga)	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Jumlah Desa Tertinggal dan sangat tertinggal	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	BPMPD, PU, Disdik, dinkes
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	BPMPD
		Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	BPMPD
		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	BPMPD
		Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	BPMPD
	Jumlah BUMDES yang difasilitasi dalam pembentukan dan pengembangannya (unit)	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	
	Jumlah aparat desa yang ditingkatkan kapasitasnya (orang)		
Meningkatnya pemberdayaan kualitas kehidupan serta perlindungan perempuan dan anak untuk menunjang ketahanan keluarga			
	Indeks pembangunan gender (IPG)	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		
	Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak yang diselesaikan	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

SASARAN	INDIKATOR KINERJA /SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
	Rasio APM perempuan terhadap laki - laki	Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	
	- SD		
	- SLTP		
	- SLTA		
	Persentase anak yang bermasalah dengan hukum yang dilayani dan dilindungi	Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan Anak	
Pengembangan kapasitas kepemudaan sebagai agen pembangunan dan perubahan yang bertanggung jawab, berjiwa wirausaha dan mandiri;			
	Jumlah kelompok usaha pemuda produktif yang dibina dan dikembangkan (kelompok)	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	DISPORA
	Jumlah Pemuda kader, pemuda pelopor dan pemuda wirausaha tingkat Kabupaten	Program peningkatan peran serta kepemudaan	DISPORA

